

TAJUK RENCANA

Darurat Judi Online

BERITA mengejutkan dilansir koran ini, Kamis (27/6) kemarin. Lebih dari 1.000 orang di lembaga DPR dan DPRD terlibat judi online atau daring. Totalnya lebih dari 63.000 transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp 25 miliar. Bagaimana tidak mengejutkan, mereka yang terlibat dalam judul ini adalah orang-orang pilihan yang dikenal sebagai orang-orang baik, orang-orang terhormat pilihan masyarakat dan mestinya juga orang-orang yang bisa menjadi panutan masyarakat.

Sumber berita ini juga bukan sembarangan narasumber, yaitu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustia Vandana. Jadi merupakan lembaga resmi negara. Info juga disampaikan di forum resmi, yaitu dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Jakarta. Jadi, informasi yang ditayang koran ini memang valid dan tidak perlu diragukan.

Tentu kita sangat prihatin dengan kenyataan ini. Judul ternyata sudah mewabah, menjangkiti banyak orang, mulai dari masyarakat awam sampai kalangan elite. Bahkan Kepala PPATK mengungkapkan berbagai kalangan yang sudah kecanduan judi, ada pejabat daerah, pensiunan, profesional lainnya, dokter, wartawan, notaris dan lainnya. Mungkin saja orang-orang di sekitar kita juga ada yang bermain judi, karena kalau sudah asyik masuk dengan gadget masing-masing, kita tidak tahu apa sebenarnya yang sedang dilakukan.

Motivasi berjudi, termasuk judi, pasti karena ingin mendapatkan banyak keuntungan. Ingin kaya atau lebih kaya lagi. Dengan mengorbankan sedikit demi sedikit uang yang dimiliki, ingin mendapatkan uang yang banyak. Sedangkan kalau sudah kecanduan, akan terus pasang lagi dan pasang lagi, sehingga menjadi banyak uang yang dikeluarkan. Kalau pun sesekali menang, itu hanya pancingan dari bandar judi online agar yang bersangkutan tergiur untuk main terus.

Diungkapkan Kepala PPATK Ivan

Yustia Vandana, perkembangan transaksi terkait judi daring paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020, 2021 dan terus berkembang hingga tahun 2024. Di kuartal pertama saja di tahun ini, PPATK menemukan transaksi sebesar Rp 101 triliun lebih terkait dengan judi online. Jumlah transaksi yang dianalisis secara keseluruhan sudah mencapai 400 juta transaksi di tahun ini.

Sebenarnya, berdasar banyak cerita dan pengamatan kenyataan, tidak ada orang yang kaya karena judi. Mereka yang punya harta banyak umumnya karena keberhasilannya dalam berusaha. Sebaliknya, orang yang sudah kecanduan judi, maka kebangkrutan yang menanti. Berbagai permasalahan hidup juga akan dihadapi. Kasus istri yang sampai tega membakar suami karena gajinya digunakan untuk berjudi online bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak terulang lagi.

Melihat realitas judul yang sudah menjangkiti banyak kalangan ini maka bisa dikatakan sekarang ini sudah pada vasa darurat judi online. Karena itu berbagai pihak berwajib terkait mesti harus segera bertindak mengatasi penyakit masyarakat ini. Terkait dengan keterlibatan judul para anggota legislatif, tentu harus segera diproses secara kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sebab data mereka di PPATK sudah lengkap. Di sisi lain secara norma hukum juga bisa dipidana, berdasar

Pasal 303 KUHP. Di pasal undang-undang ITE juga menyebutkan judi online dan pemainnya bisa dipidana. Karena itu Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring yang dibentuk Presiden Jokowi dengan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 dengan ketua Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, mestinya sudah mendapat data-data dari PPATK mestinya segera bertindak.

Agar Satgas Pemberantasan Judi Daring berjalan baik, tentu saja perlu dukungan dari kita semua. Untuk itu mari bersama-sama kita perangi judi. Selamatkan orang-orang di sekitar kita dari berbagai permasalahan besar akibat judi. □-d

Izin Usaha Pertambangan dan Nahdlatul Ulama

PEMBERIAN Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk ormas, bagi saya adalah langkah yang baik dari pemerintah, dan NU patut mengambillnya. Setidaknya ada tiga alasan utama. Pertama, pertambangan, suka atau tidak suka, akan tetap berjalan dengan atau tanpa peran ormas. Dunia yang ideal, memang tidak ada aktivitas penambangan. Tapi itu jelas irrelevan dan utopis. Atau jika diharapkan dunia ini menjajaki energi terbarukan, jelas itu juga bukan dalam waktu dekat.

Kita belum siap dengan infrastrukturturnya. Maka, masuknya ormas khususnya NU dalam dunia pertambangan justru akan meningkatkan aspek penting pertambangan, yakni kepedulian terhadap lingkungan dan sosial.

Kedua, potensi sektor tambang ini juga sangat besar, yakni Rp 65.000T. Ini setara dengan 20 Kali Lipat APBN 2024 yang ada di kisaran Rp 3.325.1 triliun. Ditambah menurut data, untuk emas total produksi kita masih bisa bertahan sampai 30 tahun lagi, tembaga kita 100 tahun lagi, timah 11 tahun, nikel 58 tahun, dan batubara 49 tahun lagi. Apa iya, kita hanya mau menyerahkan kepada swasta atau asing? Sementara ormas sebagai penggerak jutaan warga negara hanya menjadi penonton, atau bahkan terpinggirkan saja.

Ketiga, secara internal NU perlu membangun kemandirian ekonomi. Pola organisasi NU yang sangat desentralistik sejak dulu, membuat hampir semua aktivitas sosial ekonomi Jamiyyah telah dilakukan oleh seluruh komponen NU, bahkan sampai level anak ranting (tingkat desa/kalurahan), seperti berupa sekolah, universitas, pesantren, rumah sakit, dan hampir bahkan semua jenis usaha. Model ini tentu ada sisi positifnya, meskipun nampak sekali, pada akhirnya NU secara kelembagaan agak lemah secara ekonomi. Padahal, sebagai organisasi dengan ratusan juta jemaah, tentu membutuhkan sumber daya ekonomi yang mumpuni. Karena itu, diperlukan unit usaha yang tidak bersinggungan dengan akar rumput. Dalam pandangan saya, tambang adalah salah satunya.

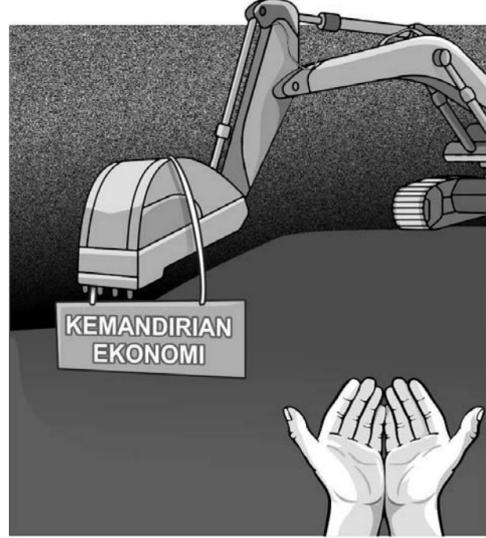
NU Membangun Perusahaan Tambang Ramah Lingkungan

Apakah perusahaan tambang milik NU bisa menjadi perusahaan tambang yang ramah lingkungan dan berdampak sosial yang luas? Jawabannya pasti bisa. Dan menurut saya itu tidak

Abdul Qoyum

lah sulit. Mengingat DNA NU memang merupakan lembaga sosial keagamaan yang tujuan utamanya memang gerakan perubahan ekonomi, sosial, dan masyarakat.

Terlebih, menurut data ESG Thompson Reuters, saat ini dalam list perusahaan ESG, yakni perusahaan yang memenuhi aspek Lingkungan,



KR-JOKO SANTOSO

Sosial dan Governance, ada beberapa perusahaan tambang yang masuk di dalamnya, seperti United Tractor, Bumi Resources, Bukit Asam, Indo Tambang Raya, dan Adaro Energi. Perusahaan tersebut masuk dalam kategori perusahaan ESG Index, yang artinya memiliki kebijakan yang ramah lingkungan, dan serta berdampak sosial, sejak 2009 sampai dengan 2023.

Beberapa kriteria ESG dalam aspek lingkungan (*Environmental*) seperti, *Resources use* (efisiensi energi, penggunaan air, manajemen lingkungan, penggunaan listrik), *emission* (emisi karbon, kebijakan daur ulang sampah, investasi untuk lingkungan, dll), dan *innovation* (produk ramah lingkungan, inisiatif produk organik dll). Sedang pada aspek sosial, terdapat beberapa indikator antara lain kebijakan ketenagakerjaan (jaminan kesehatan, training, kesetaraan gender, dan disabilitas), Hak Asasi Manusia, *Community* (donasi, CSR, dll). Kesemua aspek ini harusnya lebih mudah dilakukan oleh PT Tambang yang dikelola oleh NU, karena sesuai dengan DNA organisasi.

Karena itu, dalam pandangan kami, kekhawatiran beberapa pihak bahwa perusahaan tambang milik ormas (NU) akan bertabrakan dengan norma ling-

kungan, sebenarnya agak berlebihan. Toh, paling tidak, pengelolaan tambang bukanlah hal yang diharamkan asalkan tidak merusak alam, tentu saja dengan standard tertentu. Karena jika setiap pemanfaatan sumber daya alam dianggap merusak alam, seluruh aktivitas ekonomi bisa juga terkena dalil ini.

Akselerasi Gerakan Sosial NU

NU sebagai ormas keagamaan yang DNA nya adalah gerakan sosial, akan membuat langkah NU semakin cepat karena didukung sumber daya ekonomi yang mumpuni. Sudah bukan rahasia lagi bahwa nasionalisasi pengelolaan sumber daya ekonomi baik itu perbankan, atau SDA adalah cara terbaik memaksimalkan dampak langsungnya terhadap masyarakat. Jika perusahaan itu milik pribadi tentu saja, rakyat bisa menikmati melalui lapangan kerja, dan pajak. Tetapi jika perusahaan ini dikelola oleh negara maka, bahkan laba bersih pun bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. NU sebagai ormas keagamaan adalah gerakan sosial dengan jejaring luas dan mengakar akan membuat dampak lebih besar untuk masyarakat.

Orang banyak mengkritik NU terkait tambang karena soal SDM. Hal ini juga tidak perlu ditakutkan berlebihan, karena SDM NU yang memiliki keahlian soal tambang ini cukup banyak. Dan lagi perlu diingat, bahwa tambang ini dikelola oleh perusahaan yang profesional, maka tentu saja bisa merekrut orang-orang profesional dalam bidang tersebut. Tetapi tentu saja semua itu butuh tatakelola yang baik, analisis kelayakan bisnis yang baik. Kembalikan ini pada cara bisnis yang benar, dengan spirit tujuan sosial. Jika dua hal itu dilakukan, harusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Mari kita tunggu saja. □-d

***) Dr. Abdul Qoyum, M.Sc.Fin,**
Ketua Lembaga Perekonomian PWNU DIY.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salaman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanryk23@yahoo.com, iklanryk13@gmail.com. **Langganan per bulan** termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Edukasi Pajak Kaum Muda

EDUKASI pajak, terutama bagi kaum muda, kian mendesak. Mari kita beranjak dari data. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sejumlah 278,8 juta jiwa pada 2023. Sebanyak 69,13% penduduk Indonesia berusia produktif, yakni usia 15-64 tahun.

Kaum muda menurut UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah mereka yang berusia 16-30 tahun. BPS merinci, terdapat 64,16 juta pemuda di Indonesia pada 2023. Penduduk muda ini merupakan 23,18% dari total penduduk Indonesia.

APBN kita masih sangat tergantung pada penerimaan pajak dari masyarakat. Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.718 triliun. Penerimaan pajak ini menyumbang sekitar 70 persen dari total pendapatan negara dalam APBN 2023 sebesar Rp 2.463 triliun.

Besarnya kontribusi penerimaan pajak bagi perekonomian negara membuat kita perlu ikut memikirkan bagaimana cara efektif mengadakan edukasi pajak, khususnya bagi kaum muda usia produktif. Kaum muda perlu mendapatkan pemahaman yang benar tentang manfaat pajak melalui edukasi sejak usia dini.

Edukasi pajak

Pajak yang dihimpu dari masyarakat menjadi penopang utama jalannya perekonomian negeri kita. Tanpa pajak, pemerintah tidak dapat membangun sarana publik dan menggaji pegawai negeri.

Pendidikan formal di sekolah memang sudah berupaya menanamkan pemahaman akan pentingnya pajak di hati kaum muda. Akan tetapi, pendidikan kesadaran pajak jalur formal ini perlu didampingi dengan pendidikan berbasis keluarga dan komunitas.

Melalui obrolan dan permainan sederhana, orangtua dan guru dapat menanamkan pengertian pajak di hati anak dan remaja. Orangtua dan pendidik bisa mengajak anak membayar

Bobby Steven

pajak' saat menggunakan fasilitas tertentu. 'Pajak' itu lantas digunakan untuk merawat sarana atau untuk membantu sesama. Ini adalah langkah awal memperkenalkan manfaat pajak sejak usia dini.

Edukasi pajak juga bertujuan agar warga masyarakat, khususnya kaum muda, tidak hanya menjadi ipenumpang gratisan atau *free rider*. Artinya, hanya enak-enak saja menggunakan fasilitas negara, tetapi tidak ikut berkontribusi melalui pajak bagi pembangunan bangsa.

Kreator konten

Edukasi pajak juga perlu menyasar kreator konten, yang sebagian besar generasi muda. Mengapa? Nilai pasar industri kreator konten di Indonesia bisa mencapai Rp 4 triliun hingga Rp 7 triliun. Nilainya akan meningkat lima kali lipat pada 2027 (Burhan, 2023). Jumlah ini signifikan sebagai aset ekonomi negara.

Besarnya potensi ekonomi sektor konten kreatif tampak dari pertumbuhan YouTube di Indonesia. Gautam Anand menyatakan, lebih dari 600.000 kreator di Indonesia telah menerima pendapatan di YouTube. Sebagian kreator konten Indonesia juga telah berperan menyerap tenaga kerja baru di sektor industri kreatif.

Sesuai aturan, seorang kreator konten yang berpenghasilan melebihi Rp 4,5 juta per bulan wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Cara mendaftarkan diri dan membayar pajak sekedar sangat mudah. Bisa juga secara daring melalui aplikasi M-Pajak.

Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan

edukasi perpajakan pada generasi muda. Saat ini DJP mengembangkan inovasi fitur perpajakan digital. Wajib pajak dapat melaporkan dan membayar semua pajaknya melalui platform digital iDJP Online.

DJP juga sedang mengembangkan *Core Tax Administration System* (CTAS) yang memudahkan automasi proses perpajakan (Utami, 2023). Tujuannya agar masyarakat, termasuk kaum muda, semakin mudah mengurus pajak di tengah kesibukan.

Kita berharap, kaum muda semakin sadar akan pentingnya kontribusi pajak masyarakat bagi pemerataan pembangunan di negeri tercinta. Memang benar, akhir-akhir ini tersiar kabar penyelewengan oknum pegawai pajak. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa negara tidak lagi mampu mengelola pajak dengan baik.

Berkat pajak, aparaturnya dan lembaga-lembaga negara dapat bekerja melayani masyarakat. Karena pajak, jalan dan aneka fasilitas umum yang kita pakai bisa dibangun dan dirawat. Jadi, orang (muda) bijak taat pajak! □-d

***) Dr. Bobby Steven MSF, Biarawan dan Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.**

Pojok KR

SYL beri Rp 1,3 M, Firli bakal diperiksa.
-- Kita tunggu, mengaku atau tidak?

Data ibarat tambang, harus dijaga.
-- Rawan dijual ke pihak lain.

Dubes Jepang belajar moderasi Islam.
-- Moderasi Islam memang bisa dicontoh.

Beraksi